

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PETANI GARAM DI DESA
PESANGGRAHAN KABUPATEN BANGKALAN SEBAGAI UPAYA
MENINGKATKAN PRODUKSI GARAM**

Nurul Komaria

Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
komariia27@gmail.com

Endang Indartuti

Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
endangindartuti@untag-sby.ac.id

Eddy Wahyudi

Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
ediwahyudi@untag-sby.ac.id

ABSTRACT

This research focuses on analysing the empowerment of salt farming communities in Pesanggrahan Village, Bangkalan Regency as an effort to increase salt production. The purpose of this research is to analyse the empowerment of salt farming communities in Pesanggrahan Village, Bangkalan Regency as an effort to increase salt production. This research uses descriptive qualitative methods with primary data collection and secondary data. Primary data was obtained from observations, interviews, and documentation. While secondary data is taken from journals, books, and other relevant references. This research uses Mardikanto's empowerment theory, focusing on community empowerment. Empowerment contains four aspects, namely human development, business development, environmental development, and institutional development. The results of this study discuss these four aspects in the context of implementing the community empowerment programme for salt farmers in Pesanggrahan Village, Bangkalan Regency.

Keywords: *Empowerment, Farmers, Salt*

ABSTRAK

Penelitian ini berfokus pada analisis pemberdayaan masyarakat petani garam di Desa Pesanggrahan Kabupaten Bangkalan sebagai upaya meningkatkan produksi garam. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pemberdayaan masyarakat petani garam di Desa Pesanggrahan Kabupaten Bangkalan sebagai upaya meningkatkan produksi garam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif

deskriptif dengan pengumpulan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder diambil dari jurnal, buku, dan referensi lain yang relevan. Penelitian ini menggunakan teori pemberdayaan Mardikanto, dengan fokus pada pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan memuat empat aspek yaitu bina manusia, bina usaha, bina lingkungan, dan bina kelembagaan. Hasil penelitian ini membahas empat aspek tersebut dalam konteks pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat petani garam di Desa Pesanggrahan Kabupaten Bangkalan.

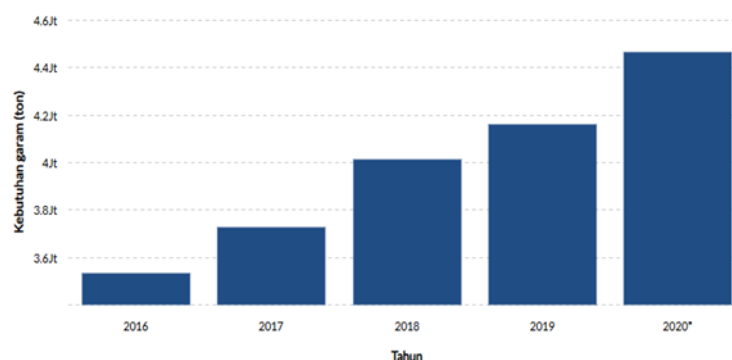
Kata Kunci: *Pemberdayaan, Petani, Garam*

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dan termasuk negara yang memiliki laut yang luas. Indonesia memiliki lebih dari 17.500 pulau, 108.000 kilometer garis pantai, dan tiga perempat wilayahnya merupakan lautan (Alifa & Zahidi, 2024). Dengan luas tersebut, Indonesia menempati posisi keempat sebagai negara dengan garis pantai terpanjang di dunia, dengan total panjang melebihi 95.181 kilometer (Baihaki, 2013). Dengan wilayah maritim yang luas ini, Indonesia seharusnya mampu menghasilkan garam dengan jumlah besar dan mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Dengan demikian, garam dianggap memiliki karakteristik yang rentan dan layak diposisikan menjadi komoditi strategis (Oki et al, 2022)

Garam merupakan komoditas strategis yang diperlukan untuk berbagai hal baik yang digunakan untuk produksi pangan maupun produksi industri nonpangan (Felfina, 2022). Garam tidak hanya digunakan sebagai kebutuhan pokok konsumsi saja, tetapi juga berperan dalam kebutuhan bahan baku berbagai proses industri (Putri & Sugiarti, 2021). Kebutuhan ini tidak lagi hanya terbatas pada garam dapur, tetapi juga mencakup kebutuhan dalam industri (Safitri, 2024). Transformasi garam menjadi komoditas strategis ini menunjukkan betapa pentingnya peran sektor pergarahan dalam mendukung ketahanan ekonomi nasional.

Gambar 1. Kebutuhan Garam Indonesia Tahun 2016-2020

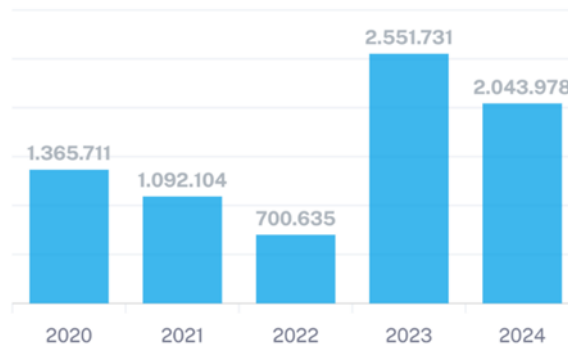


Sumber: Lokadata (2021)

Berdasarkan gambar 1.1, kebutuhan garam di Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Garam menjadi bahan baku vital dalam berbagai

sektor industri, termasuk industri kimia, tekstil, dan farmasi. Meskipun terlihat sederhana, garam memiliki nilai yang besar dan penting bagi kehidupan (Rahmayani, 2024). Setiap tahunnya, kebutuhan garam industri di Indonesia meningkat sebesar 5%-7%. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran garam dalam mendukung operasional dan keberlanjutan sektor industri tersebut.

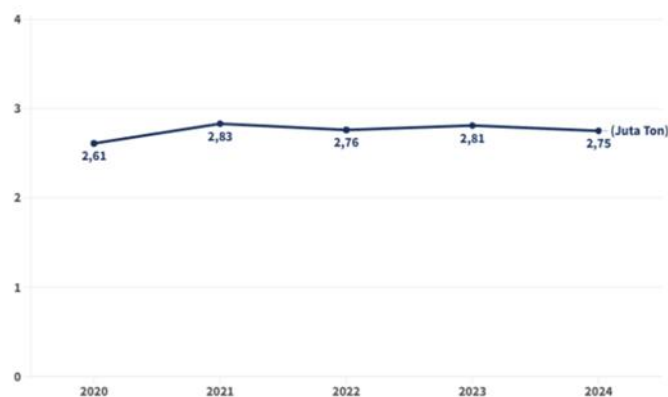
Gambar 2. Produksi Garam Indonesia (2020-2024)



Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan (2025)

Berdasarkan gambar 1.1, setiap tahunnya produksi garam di Indonesia mengalami peningkatan dan penurunan yang tidak stabil. Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan, salah satu faktor rendahnya produksi garam disebabkan oleh kondisi cuaca yang tidak menentu, khususnya musim kemarau basah. Fenomena ini menyebabkan tingkat curah hujan tetap tinggi selama musim yang seharusnya kering, yang pada akhirnya menghambat proses kristalisasi garam di lahan tambak sehingga membuat produksi garam rakyat tidak optimal. Produksi garam rakyat sangat bergantung pada sinar matahari untuk menguapkan air laut dan menghasilkan garam, menjadi tidak normal dalam kondisi ini.

Gambar 3. Data Impor Garam Tahun 2020-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik (2025)

Dalam data yang dirilis BPS (Badan Pusat Statistik) di gambar 1.2, menunjukkan bahwa impor garam di Indonesia tidak kunjung berkurang. Dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, impor garam masih berada pada kisaran 2 juta ton. Hal ini mencerminkan ketergantungan Indonesia yang cukup tinggi terhadap garam

impor. Kondisi ini menjadi sangat mengkhawatirkan karena ketergantungan Indonesia pada impor garam membuka berbagai potensi kerentanan, baik segi ekonomi maupun keamanan pangan nasional (Setiani, 2023). Ketergantungan pada impor garam tidak hanya mengganggu kestabilan pasokan garam di Indonesia, tetapi juga meningkatkan risiko terhadap perubahan harga dan kebijakan negara-negara pemasok. Jika terjadi kenaikan harga, akan memengaruhi harga di pasar dan memperburuk kondisi ekonomi. Sementara itu, produksi garam lokal yang dihasilkan oleh para petani tambak masih terbatas, terutama saat musim hujan.

Gambar 1. Data Penghasil Gara Nasional



Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan (2025)

Berdasarkan data produksi garam pada gambar 1.3, Provinsi Jawa Timur menduduki peringkat pertama dengan produksi mencapai 863.332 ton. Hal ini menunjukkan bahwa Jawa Timur memiliki potensi besar untuk terus meningkatkan produksinya dan berperan penting dalam industri garam nasional. Data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun 2023 ini menggambarkan bahwa provinsi tersebut memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap produksi garam di Indonesia.

Salah satu daerah penghasil garam utama di Provinsi Jawa Timur adalah Pulau Madura sehingga banyak dikenal dengan julukan Pulau Garam. Hal ini dikarenakan produksi garam yang dihasilkan oleh Pulau Madura mampu menyumbang sekitar sepertiga dari total produksi garam nasional, menjadikannya contributor terbesar di Jawa Timur (Aminuloh et al., 2019). Pulau Madura terdiri dari 4 Kabupaten yaitu Kabupaten Bangkalan, Sampang, Sumenep dan Pamekasan. Dikutip dari berita nusantara Kompas, luas tambak garam di Madura tersebar di 4 Kabupaten yakni Sumenep 6.220,4 ha, Sampang 4369,7 ha, Pamekasan 1963,8 ha, dan Bangkalan 736,9 hektar.

Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam memberikan dasar hukum bagi upaya pemberdayaan masyarakat petani garam di Kabupaten Bangkalan sebagai strategi peningkatan produksi garam. Kebijakan ini menekankan pentingnya peran pemerintah dalam meningkatkan

kapasitas petani garam melalui pelatihan, pendampingan teknis, serta dukungan akses permodalan dan teknologi. Selain itu, perlindungan bagi petambak garam mencakup segala upaya untuk membantu mereka menghadapi tantangan usaha, termasuk kendala cuaca, perubahan iklim, serta kebijakan yang kurang berpihak, seperti impor garam. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat petani garam menjadi langkah penting dalam menciptakan kemandirian ekonomi dan keberlanjutan sektor pergarahan.

Berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan tersebut, pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, memperbaiki kesejahteraan mereka, serta mendorong peningkatan produksi garam di tingkat nasional. Pemberdayaan masyarakat saat ini sudah diterima bahkan sudah berkembang dalam berbagai literatur di dunia barat (Sururi, 2021). Dalam hal ini, pemerintah diharapkan dapat menjalankan berbagai upaya pemberdayaan masyarakat melalui program-program, terutama bagi kelompok petani garam yang bergantung pada sektor ini sebagai mata pencaharian utama mereka.

Kabupaten Bangkalan adalah salah satu kabupaten yang terletak di bagian barat Pulau Madura. Kabupaten ini memiliki topografi yang beragam, terdiri dari dataran rendah di wilayah pesisir serta perbukitan di bagian tengah dan timur. Beberapa daerah pesisirnya dimanfaatkan untuk perikanan dan tambak garam, meskipun produk garam di wilayah ini masih tergolong rendah dibandingkan kabupaten lain di Madura. Wilayah penghasil garam di Kabupaten Bangkalan terdapat di beberapa kecamatan yaitu Kecamatan Kwanyar, Kecamatan Kamal, Kecamatan Klampis, Kecamatan Sepuluh dan Kecamatan Tanjung Bumi.

Tabel 1. Produksi Garam Di Kabupaten Bangkalan Tahun 2020-2024

Nama Kecamatan	Produksi (ton)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kamal	667,00	285,00	170,40	1.178,26	1.140,00
Kwanyar	133,50	524,00	252,00	1.300,60	1.394,50
Klampis	805,60	224,40	150,60	2.156,10	1.087,00
Sepuluh	688,50	394,00	124,60	1.236,70	1.376,00
Tanjung Bumi	1.560,00	1.400,00	17,90	1.688,70	1.897,00
Total	3.854,60	2.827,40	715,50	7.560,36	6.894,50

Sumber: Dinas Perikanan dan Kelautan Bangkalan (2025)

Berdasarkan data yang tercantum dalam tabel 1.3, hasil produksi garam di wilayah-wilayah ini cenderung tidak stabil dari tahun ke tahun. Pada tahun 2024 hasil produksi mayoritas kecamatan mengalami kenaikan, terutama Kecamatan Kwayar yang cenderung mengalami kenaikan setiap tahun. Kecamatan Kwanyar terdiri atas beberapa desa atau kelurahan, dengan total luas 47,97 km² atau 4797 hektare. Terletak pada ketinggian antara 6 hingga 24 meter diatas permukaan laut (mdpl), wilayah ini berada di kawasan pesisir dengan suhu yang dapat mencapai 32 derajat Celcius, serta berbatasan langsung dengan selat Madura (Aminulloh, 2022). Sumber daya alam di Kecamatan Kwanyar Sebagian besar dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas perikanan, seperti perikanan tangkap, budidaya, pengolahan,

pemasaran dan usaha garam, tetapi kegiatan usaha garam kurang mendapatkan perhatian lebih dibanding kegiatan usaha perikanan lainnya (Rakhman & Listiana, 2023).

Petani garam di Desa Pesanggrahan, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan masih menghadapi beberapa permasalahan yang menghambat optimalisasi proses produksi garam. Salah satu permasalahan utama yang dihadapi seperti kurangnya pelatihan yang diberikan sehingga menyebabkan rendahnya pengetahuan dan keterampilan petani garam dalam menerapkan inovasi-inovasi baru, baik dalam teknik produksi maupun pengelolaan pascapanen. Akibatnya, sebagian besar petani garam masih sangat bergantung pada kondisi cuaca untuk menghasilkan garam, tanpa adanya alternatif yang dapat membantu meningkatkan kuantitas produksi saat cuaca tidak mendukung (Rakhman & Listiana, 2023).

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat petani garam di Desa Pesanggrahan, Kabupaten Bangkalan. Penelitian ini akan dituangkan dalam kajian dengan judul “Pemberdayaan Masyarakat Petani Garam Di Desa Pesanggrahan Kabupaten Bangkalan Sebagai Upaya Meningkatkan Produksi”. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai efektivitas kebijakan dan program pemberdayaan yang telah diterapkan, faktor-faktor pendukung maupun penghambat dalam pelaksanaannya, serta dampak yang ditimbulkan terhadap peningkatan produksi garam dan kesejahteraan petani.

B. KAJIAN TEORITIS

Teori Sosial

Teori sosial merupakan seperangkat konsep dan kerangka berpikir yang digunakan untuk memahami, menjelaskan, dan menganalisis fenomena sosial dalam masyarakat. Teori ini membantu menjelaskan hubungan antara individu dengan masyarakat, bagaimana struktur sosial terbentuk, serta bagaimana proses interaksi memengaruhi tindakan dan institusi sosial. Menurut Anthony Giddens (1984), teori sosial adalah usaha sistematis untuk mengembangkan pemahaman mengenai kehidupan sosial manusia melalui penjelasan terhadap pola-pola hubungan dan struktur masyarakat. Ia menekankan adanya hubungan timbal balik antara struktur sosial dan tindakan individu, sebuah konsep yang disebut sebagai strukturalisme.

Karl Marx (1859) memandang teori sosial sebagai alat kritik terhadap ketimpangan dalam masyarakat. Menurutnya, struktur sosial kapitalis menciptakan konflik antar kelas, terutama antara kaum borjuis (pemilik modal) dan proletar (kelas pekerja). Marx mengembangkan teori konflik yang menekankan bahwa perubahan sosial bersumber dari pertentangan kepentingan ekonomi yang melekat dalam struktur sosial. Di sisi lain, posisi teori Marx dimasukkan pada perspektif materi yang memengaruhi perilaku manusia. Jadi dalam perdebatan *body vs mind*, Marx menyatakan *body* sebagai kata kunci penyebab perilaku. Pemikiran ini menghasilkan konsepsi teoretik *historis materialism*.

Sementara itu, menurut Durkheim, sosiologi adalah mempelajari apa yang ia sebut sebagai fakta-fakta sosial, yakni sebuah kekuatan dan struktur yang bersifat eksternal, tetapi mampu memengaruhi perilaku individu. Dengan kata lain, fakta

sosial merupakan cara-cara bertindak, berpikir, dan berperasaan, yang berada di luar individu, dan mempunyai kekuatan memaksa yang mengendalikannya. Fakta sosial yang dimaksud di sini tidak hanya bersifat material, tetapi juga nonmaterial, seperti kultur, agama, atau institusi sosial. Durkeim percaya bahwa masyarakat dapat dipelajari secara ilmiah. Ia menolak pendekatan individual dalam memahami fenomena dalam masyarakat dan lebih memilih pendekatan secara sosial.

Max Weber, seorang ahli sosiologi dari Jerman, memiliki pendekatan yang berbeda mengenai teori sosial. Weber menjelaskan bahwa inti dari ilmu sosial adalah memahami tindakan sosial, yaitu semua tindakan atau perilaku manusia yang dilakukan dengan maksud tertentu dan dipengaruhi oleh orang lain atau aturan sosial. Menurut Weber, tindakan dikatakan sosial Ketika tindakan itu berisi tiga unsur:

1. Perilaku itu mempunyai makna subjektif.
2. Perilaku itu mempengaruhi perilaku-perilaku pelaku lain.
3. Perilaku itu dipengaruhi oleh perilaku-perilaku lain.

Unsur yang ditekankan oleh Weber dalam pengertiannya adalah makna subjektif seorang pelaku. Tindakan sosial bagi Weber tidak semestinya terbatas kepada tindakan positif yang dapat diperhatikan secara langsung. Tindakan juga meliputi tindakan negatif seperti kegagalan melakukan sesuatu, atau penerimaan suatu situasi secara pasif.

Pembangunan

Kartasasmita (1997) menegaskan bahwa, pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dalam arti luas. Terkait dengan kajian tentang pembangunan, Muhi *et. Al* (1993) mengemukakan beberapa pendekatan teoritis, sebagai berikut:

- 1) Teori Evolusi, yang mengacu kepada evolusi peradaban yang dikemukakan oleh Charles Darwin yang menyebutkan bahwa setiap komunitas akan mengalami perubahan dari kehidupan yang sangat sederhana ke arah yang semakin kompleks, sebagai akibat dari perubahan-perubahan sosial, ekonomi, kependudukan, geografi, rasial, teknologi, maupun ideologi.
- 2) Teori Perubahan Sosial dari Emile Durkheim (1964), yang menyatakan bahwa pembangunan terjadi sebagai akibat adanya perubahan struktur sosial dalam bentuk “pembagian pekerjaan”. Sedang Redfield (1947) menyatakan bahwa pembangunan terjadi karena terjadinya perubahan masyarakat tradisional ke arah masyarakat perkotaan
- 3) Teori Structural Fungsional dari Parsons (1951) yang mengemukakan bahwa pembangunan terjadi karena adanya perubahan status dari suatu interaksi sosial yang terjadi di dalam:
 - a) Adaptasi terhadap kebutuhan situasional
 - b) Pencapaian tujuan-tujuan
 - c) Integrasi atau pengaturan tata-hubungan
 - d) Pola pemeliharaan atau pengurangan ketegangan dari pola budaya tertentu
- 4) Teori Ekonomi dari Gunar Mirdal (1970) mengemukakan bahwa pembangunan terjadi karena beberapa kondisi ekonomi yang mencakup:
 - a) Hasil dan pendapatan

- b) Tingkat produktivitas
- c) Tingkat kehidupan
- d) Sikap dan pranata
- e) Rasionalitas

Terkait dengan teori ini, Rostow (1962) mengemukakan adanya tahapan pertumbuhan ekonomi dari masyarakat tradisional, yaitu: persiapan tinggal landas, tinggal landas, dorongan menuju kematangan, serta konsumsi masal yang sangat tinggi;

- 5) Teori Konflik yang dicetuskan oleh Karl Max (1919-1883) yang menyatakan bahwa pembangunan terjadi karena adanya konflik atau pertentangan kepentingan ekonomi antar kelas antar kelas pemodal (yang berkuasa) dan kelas yang tertindas (buruh).
- 6) Teori Ekologi, yang dikemukakan oleh Odum (1971) tentang hubungan antar manusia dengan lingkungannya (fisik dan sosial). Menurutnya, pembangunan terjadi sebagai akibat pemanfaatan sumberdaya yang semakin terbatas.
- 7) Teori Ketergantungan yang berkembang di Amerika Latin sebagaimana dilaporkan oleh Frank (Wilber, 1979) di mana negara maju mendominasi negara yang belum berkembang, sedemikian rupa sehingga pembangunan di negara yang belum maju sangat tergantung kepada kehendak/kebutuhan Negara maju yang menjadi “penjajah”.

Rahim (Schramm dan Lerner, 1976) mengungkapkan bahwa, di dalam setiap proses pembangunan, pada dasarnya terdapat dua kelompok atau “sub-sistem” pelaku-pelaku pembangunan yang terdiri atas:

- 1) Sekelompok kecil warga masyarakat yang merumuskan perencanaan dan berkewajiban untuk mengorganisasi dan menggerakkan warga masyarakat yang lain untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Pengertian merumuskan perencanaan pembangunan itu, tidak berarti bahwa ide-ide yang berkaitan dengan rumusan kegiatan dan cara mencapai tujuan hanya dilakukan sendiri oleh kelompok ini, akan tetapi mereka sekedar merumuskan semua ide-ide atau aspirasi yang dikehendaki oleh seluruh warga masyarakat melalui suatu mekanisme yang telah disepakati. Sedangkan perencanaan pembangunan di arus yang paling bawah, disalurkan melalui pertemuan kelompok atau pemusyawaratan pada Lembaga yang terbawah, secara formal maupun informal.
- 2) Masyarakat luas yang berpartisipasi dalam proses pembangunan, baik dalam bentuk pemberian input (ide, biaya, tenaga, dll), pelaksanaan kegiatan, pemantauan, dan pengawasan, serta pemanfaatan hasil-hasil pembangunan. Dalam kenyataan, pelaksana utama kegiatan pembangunan justru terdiri dari kelompok ini; sedang kelompok “elit masyarakat” hanya berfungsi sebagai penerjemah “kebijakan dan perencanaan pembangunan” sekaligus mengorganisir dan menggerakkan partisipasi masyarakat.

Yang dimaksudkan dengan sub-sistem “pemerintah dan penggerak” adalah semua aparat pemerintahan, penyuluh (*change agent*), pekerja-sosial, tokoh-tokoh masyarakat (formal dan informal), aktivitas LSM/LPSM yang terlibat dan berkewajiban untuk:

- a) Bersama-sama warga masyarakat merumuskan dan mengambil keputusan dan memberikan legitimasi tentang kebijakan dan perencanaan pembangunan
- b) Menginformasikan dan atau menerjemahkan kebijakan dan perencanaan pembangunan kepada seluruh warga masyarakat
- c) Mengorganisir dan menggerakkan partisipasi masyarakat
- d) Bersama-sama masyarakat melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan
- e) Mengupayakan pemerataan hasil-hasil pembangunan kepada seluruh warga masyarakat, khususnya yang terlibat langsung sebagai pelaksanaan dan atau dijadikan sasaran utama pembangunan secara adil

Sedang yang dimaksudkan dengan sub-sistem masyarakat atau pengikut, adalah: Sebagian besar warga masyarakat yang tidak termasuk dalam sub-sistem “pemerintah/penggerak” di atas, yang berkewajiban untuk:

- a) Menyampaikan ide-ide atau gagasan tentang kegiatan pembangunan yang perlu dilaksanakan, dan cara mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan, baik secara langsung maupun melalui perwakilannya yang sah dalam suatu forum yang diselenggarakan untuk keperluan tersebut.
- b) Secara positif menerima dan aktif berpartisipasi dalam pembangunan, sejak pengambilan keputusan tentang kebijakan dan perencanaan pembangunan, pelaksanaan kegiatan, pemantauan dan pengawasan, dan upaya pemerataan hasil-hasil pembangunan secara adil sesuai dengan fungsi dan pengorbanan yang telah diberikan.
- c) Memberikan masukan atau umpan balik tentang kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan;
- d) Menerima dan memanfaatkan hasil-hasil pembangunan

Sehubungan dengan itu, demi keberhasilan pembangunan kedua kelompok pelaku-pelaku pembangunan perlu menjalin hubungan psikologis yang akrab, sehingga dapat terjalin komunikasi atau berinteraksi secara efektif. Di samping itu, antar pelaku-pelaku pembangunan di dalam setiap kelompoknya masing-masing juga perlu melakukan hal yang sama.

Tentang hal ini, beberapa hal berikut ini perlu mendapat perhatian dari kedua sub-sistem pelaku-pelaku pembangunan:

- 1) Aparat pemerintah/penguasa, di dalam pengambilan keputusan tentang kebijakan dan perencanaan pembangunan harus senantiasa mau mendengarkan, memahami, dan menghayati aspirasi masyarakat, memahami kondisi dan masalah-masalah yang sedang dan akan dihadapi masyarakat. Untuk itu, terdapat tiga hal yang harus selalu diingat, yaitu (Loekman Sutrisno dan Dove, 1981):
 - a) Adanya keterlibatan anggota-anggota masyarakat untuk memberitahukan kepada penguasa tentang apa dan bagaimana dengan sebaik-baiknya pembangunan yang direncanakan harus mampu menolong mereka, dan sebaliknya, penguasa tidak boleh hanya percaya terhadap hasil-hasil konsultasi antar jenjang birokrasi pemerintah

- b) Adanya hak “tawar-menawar” (*bargaining power*) yang dimiliki oleh sub-sistem pengikut (masyarakat). Artinya, masyarakat harus diberi kesempatan untuk bila perlu menolak kebijakan atau program-program dan proyek pembangunan yang tidak mencerminkan kebutuhan masyarakat, atau kegiatan pembangunan yang akan terlalu banyak menuntut pengorbanan masyarakat tanpa imbalan manfaat yang layak yang dapat dinikmati oleh masyarakat yang akan diwajibkan untuk memberikan pengorbanan tersebut.
 - c) Setiap perencanaan harus selalu merupakan “proses belajar” (*learning process*), yaitu perlunya ada keinginan para perumus kebijakan dan perencanaan pembangunan untuk belajar dari pengalaman masyarakat dan menggunakannya sebagai acuan sebelum pengambilan keputusan.
- 2) Masyarakat harus selalu diberitahu tentang apa yang sedang dan telah direncanakan oleh penguasa, serta diberitahu cara-cara yang telah dipilih untuk melaksanakan pembangunan yang direncanakan itu. Untuk selanjutnya, masyarakat harus aktif mempersiapkan diri untuk berpartisipasi di dalam proses pembangunan tersebut.
 - 3) Masyarakat harus ditingkatkan kemampuannya (pengetahuan, sikap, keterampilan) dan diberi kesempatan seluas-luasnya untuk berpartisipasi di dalam setiap kegiatan pembangunan, sejak pengambilan keputusan perencanaan pembangunan hingga pemanfaatan hasil-hasil pembangunan.

Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat disebut sebagai upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik di bidang ekonomi, sosial, agama dan budaya (Widjaja, 2003). Dalam proses ini masyarakat didampingi untuk membuat analisis masalah yang dihadapi, dibantu untuk menemukan alternatif solusi masalah tersebut, serta diperlihatkan strategi memanfaatkan berbagai kemampuan dimiliki.

Menurut (Mardikanto, 2014) pemberdayaan merupakan suatu proses kegiatan yang bertujuan untuk memperkuat, meningkatkan, dan mengoptimalkan keberdayaan kelompok masyarakat yang tergolong lemah, baik dalam aspek sosial, ekonomi, maupun politik. Proses ini tidak hanya berfokus pada kelompok masyarakat secara kolektif, tetapi juga mencakup individu-individu yang mengalami berbagai permasalahan sosial, seperti kemiskinan, keterbatasan akses terhadap pendidikan, rendahnya keterampilan, serta keterbatasan dalam memperoleh peluang ekonomi yang layak. Dengan adanya pemberdayaan, diharapkan kelompok dan individu yang berada dalam kondisi rentan dapat memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengelola sumber daya yang tersedia, meningkatkan kapasitas diri, serta berpartisipasi aktif dalam pembangunan yang berkelanjutan. Pemberdayaan juga berperan dalam menciptakan kesetaraan dan keadilan sosial dengan memberikan kesempatan yang lebih luas bagi mereka untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan mereka secara mandiri.

Dalam melakukan pemberdayaan masyarakat petani garam di Desa Pesanggrahan Kabupaten Bangkalan, peneliti menggunakan teori menurut Totok Mardikanto (Mardikanto, 2014). Berikut indikator pemberdayaan masyarakat menggunakan teori Mardikanto dengan aspek fokus kajian sebagai berikut:

- a. Bina manusia, dimana dalam hal ini berkaitan dengan upaya pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan kapasitas individu, yaitu dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pribadi, seperti pengetahuan tentang cara meningkatkan produksi garam, menjalankan usaha, dan hal lainnya. Pengembangan kualitas sumber daya manusia ini dilakukan melalui pelatihan rutin dan kegiatan penyuluhan agar masyarakat semakin mandiri dan terampil
- b. Bina usaha, hal ini mencakup peran pemerintah desa dalam memberikan pembinaan kepada masyarakat untuk mendorong pengembangan jejaring dan kemitraan, serta mendukung pembangunan sarana dan prasarana yang dibutuhkan guna menunjang kegiatan usaha dan perekonomian masyarakat.
- c. Bina lingkungan, dalam hal ini mencakup upaya pembinaan kepada masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan, sehingga sumber daya alam yang dimiliki tetap terjaga dan berkelanjutan. Selain itu, masyarakat juga diberikan pengetahuan agar mampu memanfaatkan sumber daya yang ada secara tepat, efektif, dan tidak merusak lingkungan.
- d. Bina kelembagaan, hal ini mencakup penguatan kelembagaan ekonomi desa, seperti Koperasi Unit Desa (KUD) agar mampu menjalankan fungsinya dalam pengelolaan dan pemasaran hasil produksi atau pertanian masyarakat. Selain itu, penguatan juga dilakukan terhadap Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), terutama yang menjalankan fungsi perkreditan atau pemberian pinjaman modal untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat.

C. METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif-deskriptif. Penelitian kualitatif adalah sebuah metode penelitian yang berfokus pada pengamatan fenomena atau gejala yang terjadi secara alami (Abdussamad, 2021). Penelitian kualitatif berlandaskan naturalis dan bersumber pada pengamatan lingkungan. Salah satu jenis penelitian kualitatif adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian kualitatif yang mendeskripsikan makna dari data atau fenomena yang diamati oleh peneliti dan disertai dengan penyajian bukti-bukti yang mendukung. Pemahaman terhadap fenomena tersebut sangat dipengaruhi oleh keahlian dan ketelitian peneliti dalam melakukan analisis. Peneliti berupaya semaksimal mungkin untuk mereduksi dan memurnikan sehingga diperoleh makna fenomena yang sesungguhnya (Nasution, 2023).

2. Objek dan Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangkalan. Yang beralamatkan di Jl. Soekarno Hatta, Wr 01, Mlajah, Kec.Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Alasan memilih lokasi ini berdasarkan adanya keterlibatan dari pihak yang berwewenang dalam

melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat petani garam di Desa Pesanggrahan Kabupaten Bangkalan.

3. Sumber Data

Data Primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian. Dalam hal ini, data primer akan dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Peneliti menggunakan hasil wawancara yang didapatkan dari informan mengenai topik penelitian sebagai data primer. Data primer yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: survey langsung, wawancara langsung dengan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bangkalan, Ketua kelompok garam, Kepala Desa di Desa Produksi Garam, Pemilik Gudang Garam/pelaku usaha garam, dan Petani Garam

Data Sekunder

Data sekunder mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber-sumber yang tidak langsung, yaitu data yang sudah ada dan telah dikumpulkan atau dipublikasikan oleh pihak lain. Sumber-sumber ini dapat berupa kebijakan, artikel, jurnal, statistik, dan publikasi yang digunakan sebagai referensi atau bahan pendukung penelitian. Dalam penelitian ini, menggunakan kutipan berita, serta jurnal yang telah dipublikasi sebagai referensi penulisan dan acuan dalam penelitian ini.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Pemberdayaan masyarakat petani garam di Desa Pesanggrahan Kabupaten Bangkalan sebagai upaya meningkatkan produksi garam dengan menggunakan teori pemberdayaan Totok Mardikanto yang terdapat empat aspek pemberdayaan. Aspek ini meliputi bina manusia, bina usaha, bina lingkungan, dan bina kelembagaan.

a. Bina manusia

Upaya utama yang perlu diperhatikan dalam setiap upaya pemberdayaan adalah bina manusia. Bina manusia atau pengembangan kapasitas manusia ini meliputi pelatihan atau sosialisasi untuk memberikan inovasi kepada petani garam dalam meningkatkan produksi serta tata cara membuat garam beryodium. Dari hasil wawancara dengan Bapak Eddy Wijono selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangkalan, menyampaikan:

“Iya mbak, kami memang ada kewajiban, kewajiban untuk istilahnya untuk upaya dalam meningkatkan produksi dengan melaksanakan sosialisasi tentang pelatihan inovasi produksi garam untuk meningkatkan produksi dan tata cara pembuatan garam beryodium untuk meningkatkan kualitas garam. Kegiatan ini biasanya diadakan dua kali dalam setahun apabila ada kesempatan jadi tidak tentu waktunya kapan”. (Wawancara dilakukan pada tanggal 14 Mei 2025)

Gambar 5. Kegiatan Pelatihan Petani Garam



Sumber: Arsip Dokumentasi Diskan Bangkalan (2024)

Sementara itu, wawancara mengenai pengembangan kapasitas manusia dalam pemberdayaan masyarakat petani garam di Desa Pesanggrahan dengan Bapak Khoirul Anwar selaku pemilik usaha garam, menyampaikan:

“Ada mbak, untuk pelatihan dan sosialisasi dari dinas ada meskipun hanya 2 kali dalam setahun. Kegiatan pelatihan dan sosialisasinya ini kami dikasih tau tentang bagaimana cara membuat garam beryodium terus kami dikasih tahu gimana caranya biar tetap bisa produksi walau cuaca nggak menentu. Selain itu, Dinas Kelautan dan Perikanan juga rutin berkunjung kesini setiap bulan untuk melakukan tanya jawab ke kelompok garam mengenai penghasilan produksi garam dan menanyakan perkembangannya bagaimana”. (Wawancara dilakukan pada tanggal 15 Mei 2025)

Berdasarkan wawancara tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa bina manusia atau upaya pengembangan kapasitas manusia dalam pemberdayaan masyarakat petani garam di Desa Pesanggrahan sudah cukup baik. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangkalan telah mengadakan sosialisasi dan pelatihan untuk petani garam. Kegiatan pelatihan dan sosialisasi ini tentang inovasi dalam proses pembuatan garam agar dapat melakukan produksi di segala cuaca. Selain itu juga diberikan materi bagaimana cara meningkatkan kualitas garam. Kegiatan ini dilaksanakan dua kali dalam setahun apabila ada kesempatan.

b. Bina usaha

Bina usaha atau pengembangan kapasitas usaha ini menjadi salah satu upaya yang memiliki peran cukup penting dalam rangka pemberdayaan masyarakat untuk mendukung proses manusia. Pengembangan kapasitas usaha ini mencakup peran pemerintah mendukung pembangunan sarana dan prasarana yang dibutuhkan guna menunjang kegiatan usaha masyarakat. Sarana prasarana untuk petani garam di Kabupaten Bangkalan, khususnya di Desa Pesanggrahan sangatlah penting karena dapat memengaruhi peningkatan produksi garam. Dalam wawancara mengenai upaya pengembangan sarana dan prasarana Eddy Wijono selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangkalan, menyampaikan:

“Iya mbak, dalam upaya pengembangan kapasitas usaha ini kami mendukung petani garam dengan membantu dalam hal pengembangan sarana dan prasarana. Hal ini memang sudah ada dan menjadi perhatian bagi kami. Selama ini kami juga sudah sering membantu memberikan paket-paket bantuan kepada petani garam untuk peningkatan produksi dan kualitas garam. Paket bantuannya ini seperti

pompa dan kincir air. Selain itu, sudah kami kiriman bantuan berupa pipa untuk memperlancar saluran air serta geomembran untuk memisahkan air laut.” (Wawancara dilakukan pada tanggal 14 Mei 2025)

Gambar 6. Pemberian Bantuan Sarana Prasarana



Sumber: Dokumentasi Dinas Kelautan dan Perikanan (2024)

Berikutnya wawancara mengenai upaya pemerintah dalam pengembangan sarana dan prasarana untuk petani garam, Bapak Khoirul Anwar selaku pemilik usaha garam di Desa Pesanggrahan, menyampaikan:

“Iya mbak, kami memang menerima bantuan dari dinas, ini berupa alat-alat buat produksi garam. Bantuan itu berupa alat-alat kayak pompa air, pipa, kincir, dan geomembran. Alhamdulillah, sangat membantu. Soalnya kalau nggak ada alat-alat itu, ya kami gak akan bisa menghasilkan garam sebanyak sekarang. Geomembran itu bagus banget, jadi airnya nggak nyampur tanah, garamnya jadi lebih putih dan bersih. Pokoknya sejak ada bantuan itu, produksi kami lebih lancar dan hasilnya juga makin bagus.”. (Wawancara dilakukan pada tanggal 15 Mei 2025)

Berdasarkan wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa bina usaha atau upaya pengembangan untuk usaha bagi petani garam di Desa Pesanggrahan, sudah diupayakan oleh pemerintah daerah melalui pemberian bantuan yang meliputi pompa, kincir air, pipa untuk melancarkan saluran air, serta geomembran untuk memisahkan air laut. Dengan adanya upaya ini diakui sangat membantu petani garam, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Khoirul Anwar, salah seorang pemilik usaha garam di Desa Pesanggrahan. Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas petani garam dan secara keseluruhan mendukung perekonomian masyarakat.

c. Bina lingkungan

Bina lingkungan merupakan elemen penting yang perlu diperhatikan dalam proses pemberdayaan. Setiap kegiatan pemberdayaan seharusnya senantiasa mempertimbangkan upaya pelestarian lingkungan. Menurut (Mardikanto & Soebianto, 2017) mengatakan bahwa pengembangan kapasitas lingkungan sangat diperlukan, karena apabila pengembangan kapasitas usaha yang tidak terkendali dapat mengarah pada perilaku eksploitasi berlebihan yang berpotensi merusak lingkungan. Dalam hal ini, pengembangan kapasitas lingkungan mencakup

peningkatan kualitas lingkungan dengan membangun sarana fisik dan infrastruktur pendukung di lingkungan budidaya seperti peninggian saluran tambak, peninggian tanggul, serta pengolahan limbah produksi yang baik. Berdasarkan wawancara mengenai upaya pengembangan kapasitas lingkungan dengan Bapak Eddy Wijono selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangkalan, menyampaikan:

“Iya mbak, kami telah melakukan beberapa bantuan lingkungan, diantaranya seperti normalisasi saluran tambak garam dan peninggian tanggul untuk mendukung kelancaran budidaya. Selain itu, setiap kali kami melakukan kunjungan ke tambak, kami selalu menyampaikan atau memberikan penyuluhan kepada para petani garam untuk selalu menjaga kualitas perairan. Kami juga bekalkan ke petani udang yang berhimpitan dengan tambak garam agar selalu membuang sisa endapan dengan diolah lagi sehingga tidak langsung dibuang ke laut agar tidak mencemari lingkungan”. (Wawancara dilakukan pada tanggal 14 Mei 2025)

Gambar 7. Kegiatan Normalisasi Air



Sumber: Dokumentasi Dinas Kelautan dan Perikanan (2024)

Selanjutnya wawancara mengenai upaya pengembangan kapasitas lingkungan dengan Bapak Khoirul Anwar selaku pemilik usaha garam, menyampaikan:

“Ya mbak, Dinas telah melakukan normalisasi saluran tambak air, guna memastikan kelancaran aliran dan mencegah genangan yang berdampak negatif terhadap lingkungan sekitar. Dinas juga sudah sering mengimbau kepada kami untuk menjaga lingkungan di sekitar area tambak. Produksi garam yang kami jalankan sejauh ini termasuk ramah lingkungan karena tidak menghasilkan limbah berbahaya jadi tidak ada limbah seperti tambak udang. Meskipun begitu, kami tetap menjaga komitmen untuk tidak mencemari lingkungan. Salah satu upaya yang kami lakukan yakni dengan rutin kami melakukan kegiatan gotong royong dalam rangka pembersihan area tambak dan sungai-sungai kecil agar tidak terjadi penyumbatan dan pencemaran”. (Wawancara dilakukan pada tanggal 15 Mei 2025)

Berdasarkan wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa bina lingkungan atau pengembangan kapasitas lingkungan dalam pemberdayaan petani garam di Desa Pesanggrahan telah berjalan dengan baik. Pemerintah desa dan dinas terkait terlibat aktif melakukan pembinaan melalui penyuluhan, normalisasi

saluran tambak, peninggian tanggul dan pengelolaan limbah agar tidak mencemari lingkungan. Selain itu, Petani garam di Desa Pesanggrahan juga berkomitmen dalam menjaga kelestarian lingkungan dengan melaksanakan gotong royong dalam membersihkan lingkungan sekitar tambak.

d. Bina kelembagaan

Aspek bina kelembagaan ini upaya untuk membentuk, memperkuat dan mengembangkan lembaga atau organisasi, baik dari segi struktur, fungsi, maupun kapasitasnya, agar mampu menjalankan peran dan tanggung jawabnya Menurut (Mardikanto & Soebianto, 2017) mengatakan bahwa kelembagaan dipahami sebagai seperangkat aturan atau sistem yang umum digunakan oleh anggota suatu komunitas atau masyarakat. Bahwa tersedianya kelembagaan yang secara efektif dan berkelanjutan akan sangat berpengaruh dalam mendukung pemberdayaan masyarakat. Dalam bina kelembagaan ini adanya penguatan kelembagaan lokal misalnya kelompok tani, koperasi, dan organisasi masyarakat. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Eddy Wijono selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, menyampaikan:

“Iya mbak, terkait bina kelembagaan di Desa Pesanggrahan ini memang sudah kami bentuk kelompok garam yang berfungsi untuk mempermudah koordinasi dan pelaksanaan berbagai program dan kegiatan bantuan. Saat ini, ada tiga kelompok garam yakni kelompok Makmur, Melati, dan Al-Islah. Dengan dibentuknya kelompok ini, kami lebih mudah dalam menyalurkan bantuan seperti bantuan paket sarana dan prasarana produksi, serta lebih mudah dalam berkoordinasi apabila akan dilakukan pelatihan atau sosialisasi ini kami hanya menghubungi ketua masing-masing kelompok untuk segera disiapkan anggotanya agar bisa ikut dalam pelatihan dan sosialisasi yang akan diadakan sehingga dengan adanya kelompok ini lebih efisien jadi tidak perlu menghubungi satu-satu petani garam”. (Wawancara dilakukan pada tanggal 14 Mei 2025)

Tabel 2. Kelompok Garam Di Desa Pesanggrahan

No.	Nama Kelompok	Jumlah Anggota	Luas lahan (Ha)
1.	Makmur	9	11,9
2.	Melati	8	5
3.	Al-Islah	7	7

Sumber: Data Dinas Kelautan Dan Perikanan (2025)

Berikutnya wawancara mengenai pengembangan kelembagaan dalam pemberdayaan masyarakat dengan Bapak Khoirul Anwar selaku Ketua Kelompok Makmur, menyampaikan:

“Betul mbak, jadi kalau di Desa Pesanggrahan ini, memang sudah terbentuk kelembagaan kelompok garam yang aktif. Saat ini ada 3 kelompok yang terdiri dari Kelompok Makmur, Melati, dan Al-Islah. Saya sendiri kebetulan dipercaya sebagai ketua Kelompok Makmur. Kami setiap kelompok selalu melakukan musyawarah atau pertemuan setiap bulan untuk membahas dan tanya jawab mengenai

perkembangan garam di tambak kami, antar kelompok kami saling berbagi informasi dalam hal meningkatkan produksi garam”.
(Wawancara dilakukan pada tanggal 15 Mei 2025)

Gambar 8. Koordinasi Antar Kelompok Garam



Sumber: Dokumentasi Kepala Desa Pesanggrahan (2024)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa bina kelembagaan atau pengembangan kapasitas kelembagaan dalam pemberdayaan petani garam di Desa Pesanggrahan telah berjalan dengan baik serta memberikan dampak positif terhadap efektivitas program-program pemberdayaan yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangkalan serta mempermudah koordinasi dalam pengiriman paket bantuan. Upaya pengembangan kapasitas kelembagaan petani garam di Desa Pesanggrahan melalui tiga kelompok garam yang aktif yakni Makmur, Melati, dan Al- Islah yang menunjukkan bahwa petani garam di desa ini telah memiliki wadah organisasi yang fungsional.

Pembahasan

Pemberdayaan masyarakat petani garam di Desa Pesanggrahan Kabupaten Bangkalan sebagai upaya meningkatkan produksi garam masih belum optimal karena tidak dilakukan secara rutin. Pada penelitian ini menggunakan teori pemberdayaan dari Totok Mardikanto dimana dalam teori tersebut terdapat aspek bina manusia, bina usaha, bina lingkungan, dan bina kelembagaan. Secara keseluruhan pemberdayaan masyarakat petani garam di Desa Pesanggrahan Kabupaten Bangkalan sebagai upaya meningkatkan produksi garam sudah berjalan dengan baik dan optimal. Dari penyajian data atau dari data yang diperoleh kemudian diuraikan dalam pembahasan menurut beberapa aspek dalam teori Mardikanto adalah sebagai berikut:

a. Bina manusia

Aspek yang pertama yaitu bina manusia dimana dalam aspek ini merupakan aspek penting dalam proses kegiatan pemberdayaan. Bina manusia bisa disebut dengan pengembangan kapasitas manusia, ini sangat penting dalam proses pemberdayaan masyarakat agar petani mampu mengelola usaha garam dengan produktif. Dalam upaya ini, bentuk yang diharapkan dengan pelatihan, dan sosialisasi mengenai produksi garam. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, bahwa pengembangan kapasitas manusia dalam pemberdayaan petani garam sudah berjalan dengan cukup baik. Pogram ini telah dijalankan melalui

kegiatan pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis yang diadakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan.

Pelatihan ini dilaksanakan dua kali dalam setahun, meskipun waktu pelaksanaannya tidak selalu tetap. Materi pelatihan ini mencakup inovasi produksi garam, terutama dalam menghadapi tantangan cuaca yang tidak menentu, serta cara membuat garam beryodium guna meningkatkan kualitas produk. Selain itu, Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan kunjungan rutin bulanan dalam melakukan monitoring terhadap kelompok petani garam. Meskipun frekuensinya terbatas, namun dengan upaya yang dilakukan ini cukup dalam mendukung peningkatan kapasitas petani.

b. Bina usaha

Aspek bina usaha ini upaya yang dilakukan untuk mengembangkan usaha yang dijalankan dalam rangka meningkatkan hasil produksi garam. Dalam aspek ini, pengembangan sarana dan prasarana merupakan upaya pemberdayaan petani garam yang dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangkalan, karena berpengaruh langsung terhadap peningkatan produktivitas petani dan hasil produksi garam. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ditemukan bahwa pemerintah daerah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangkalan telah melakukan upaya penyediaan sarana produksi. Dinas Kelautan dan Perikanan telah menyalurkan bantuan berupa pompa air, kincir air, serta geomembran.

Upaya ini sejalan dengan Mardikanto & Soebianto (2017) yang menekankan bahwa pemberdayaan masyarakat harus mencakup penguatan kapasitas ekonomi melalui dukungan infrastruktur usaha. Dalam hal ini, penyediaan alat produksi garam yang lebih memadai menunjukkan keterlibatan pemerintah dalam memfasilitasi lingkungan usaha yang lebih produktif dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, program bina usaha melalui pengembangan sarana prasarana produksi garam di Desa Pesanggrahan telah memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani garam. Ketersediaan alat-alat produksi telah membantu petani meningkatkan produktivitas serta efisiensi kerja mereka. Dengan demikian, pembinaan usaha yang telah dilakukan di Desa Pesanggrahan melalui pengembangan sarana dan prasarana tergolong efektif dalam mendukung produktivitas petani garam. Namun, untuk memperkuat dampaknya, diperlukan strategi lanjutan berupa pelatihan manajemen usaha, penguatan koperasi atau kelompok tani garam, serta perluasan akses pasar.

c. Bina lingkungan

Aspek bina lingkungan menganalisis keseimbangan lingkungan dengan prinsip menjaga kelestarian sumber daya alam agar kegiatan ekonomi masyarakat tidak merusak lingkungan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ditemukan bahwa dinas terkait telah melakukan normalisasi saluran air serta memberikan penyuluhan kepada masyarakat, terutama kepada petani udang yang berdampingan dengan petani garam, agar tidak membuang limbah langsung ke laut dan mengolah sisa endapan secara bijak. Langkah ini sebagai upaya untuk meminimalisir potensi pencemaran yang dapat mengganggu ekosistem laut sekaligus merusak kualitas lahan produksi garam.

Sementara itu, produksi garam dinilai sebagai aktivitas yang ramah lingkungan. Hal ini didukung dengan adanya fasilitas penyaring limbah yang telah

disediakan untuk menghindari pencemaran terhadap saluran air dan lingkungan sekitar. Penerapan ini menunjukkan adanya kesadaran dari pelaku usaha garam terhadap pentingnya pengelolaan limbah. Petani garam menunjukkan komitmen dalam menjaga kebersihan lingkungan sekitar tambak melalui kegiatan gotong royong. Kegiatan ini secara rutin dilakukan dalam bentuk pembersihan tambak dan sungai, yang tidak hanya berfungsi menjaga aliran air tetap lancar, tetapi juga menjadi bentuk partisipasi aktif dalam pelestarian lingkungan. Hal ini ditegaskan Bapak Khoirul Anwar, yang menyatakan bahwa keberhasilan produksi garam sangat bergantung pada kondisi lingkungan yang bersih dan terjaga. Oleh karena itu, kolaborasi antara petani, pemerintah, dan masyarakat sekitar menjadi penting dalam menjaga keseimbangan antara aktivitas ekonomi dan pelestarian lingkungan.

d. Bina kelembagaan

Aspek bina kelembagaan ini upaya untuk membentuk, memperkuat dan mengembangkan lembaga atau organisasi, baik dari segi struktur, fungsi, maupun kapasitasnya, agar mampu menjalankan peran dan tanggung jawabnya secara efektif dan berkelanjutan dalam mendukung pemberdayaan masyarakat. Dalam hal ini seperti menjadi wadah koordinasi, pembinaan, serta penguatan kapasitas kolektif masyarakat petani garam. Kelembagaan yang efektif tidak hanya hadir secara struktural, tetapi juga harus menjalankan fungsi pemberdayaan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ditemukan bahwa Di Desa Pesanggrahan telah terbentuk tiga kelompok garam yang terdiri dari Mawar, Melati, dan Al-Islah yang berperan sebagai wadah koordinasi dalam penyaluran bantuan, pelaksanaan program, dan forum diskusi bagi petani garam. Fungsi kelembagaan ini tidak hanya administratif, tetapi juga mendorong terjadinya pertukaran informasi.

Interpretasi dari temuan ini memperlihatkan bahwa keberadaan kelembagaan lokal memberikan efisiensi dalam implementasi program pemberdayaan. seperti penyaluran bantuan, pelatihan, dan penyuluhan. Hal ini sejalan dengan pendapat Mardikanto & Soebianto (2017), yang menyatakan bahwa kelembagaan lokal yang kuat akan sangat berpengaruh dalam mempercepat proses pemberdayaan masyarakat. Dalam konteks Desa Pesanggrahan, dinas terkait lebih mudah menjangkau dan memonitor kegiatan petani melalui struktur kelompok tersebut, sehingga proses pemberdayaan dapat berjalan lebih tertib, sistematis, dan berkelanjutan.

Selain itu, aktivitas rutin seperti musyawarah bulanan dan pertemuan antaranggota kelompok menciptakan iklim kolaboratif dan membangun solidaritas sosial antarpetani. Ini menjadi bukti bahwa kelembagaan bukan hanya simbol formalitas, tetapi memiliki fungsi nyata dalam memperkuat komunikasi dan pengambilan keputusan bersama di tingkat akar rumput. Peran pemimpin kelompok, seperti yang dijelaskan oleh Bapak Khoirul Anwar, juga menegaskan pentingnya figur lokal dalam menggerakkan dinamika kelompok agar tetap aktif dan produktif.

E. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pemberdayaan masyarakat petani garam di Desa Pesanggrahan Kabupaten Bangkalan sebagai

upaya meningkatkan hasil produksi garam, dapat disimpulkan bahwa program pemberdayaan secara umum sudah berjalan dengan baik serta memberikan dampak yang positif bagi petani garam. Berikut yang telah dilaksanakan dalam setiap indikator meliputi:

1. Bina manusia dalam pemberdayaan yaitu telah dijalankan melalui kegiatan sosialisasi, pelatihan, dan bimbingan teknis meskipun kegiatan tersebut dilaksanakan apabila ada kesempatan saja.
2. Bina usaha dalam pemberdayaan yaitu telah melakukan upaya pengadaan sarana seperti geomembran, pompa dan kincir air.
3. Bina lingkungan dalam pemberdayaan yaitu telah melakukan pembinaan melalui penyuluhan, normalisasi saluran tambak, dan pengelolaan limbah agar tidak mencemari lingkungan.
4. Bina kelembagaan dalam pemberdayaan yaitu pembentukan dalam penguatan kelembagaan lokal melalui tiga kelompok garam yang aktif menunjukkan bahwa desa ini telah memiliki wadah organisasi yang fungsional.

Seluruh indikator dalam pemberdayaan masyarakat petani garam ini telah dilaksanakan dengan baik, akan tetapi untuk indikator bina manusia memang sudah dilakukan dengan baik dalam upaya pemberdayaan, akan tetapi masih perlu untuk diperbaiki dalam hal kejelasan waktu pelaksanaan dan intensitas kegiatan pelatihan. Meskipun demikian, secara umum pelaksanaan pemberdayaan ini telah menunjukkan hasil yang dominan baik pada setiap indikator yang dianalisis, sehingga hal tersebut perlu dipertahankan.

Saran

Dari kesimpulan hasil penelitian mengenai pemberdayaan masyarakat petani garam di Desa Pesanggrahan Kabupaten Bangkalan sebagai upaya meningkatkan produksi garam, maka disarankan agar pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dilakukan secara lebih intensif dan lebih terstruktur dalam kejelasan waktu pelaksanaan. Oleh karena itu, pelatihan dan bimbingan teknis bagi petani garam di Desa Pesanggrahan perlu ditingkatkan frekuensinya dan diselenggarakan secara rutin, tidak hanya ketika ada kesempatan. Dinas terkait perlu menyusun jadwal pelatihan yang terstruktur dengan alokasi anggaran yang jelas guna mendukung peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfiana Duwi Rahmayani. (2024). Efektivitas Program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Garam di Kabupaten Pamekasan. *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA*, 2(4), 291–298. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i4.1665>
- Alifa, N. N., & Zahidi, M. S. (2024). *PENGEMBANGAN EKONOMI BIRU SEBAGAI STRATEGI INDONESIA MENUJU EKONOMI MAJU* (Vol. 38, Issue 1). <https://e-journal.stispolwb.ac.id>
- Aminuloh, A. F., Supenti, L., & Kamsiah, K. (2019). Analisis Permasalahan Usaha Garam Rakyat di Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan. *Jurnal Penyuluhan Perikanan Dan Kelautan*, 13(1), 93–105. <https://doi.org/10.33378/jppik.v13i1.116>

- Baihaki, L. (2013). *Ekonomi-Politik Kebijakan Impor Garam Indonesia Periode 2007-2012*.
- felfina, liiklai kalimatih. (n.d.). *EVALUASI PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA GARAM RAKYAT DI KECAMATAN PANGENAN, KABUPATEN CIREBON, JAWA BARAT, 2011-2015*.
- Oki, K. K., Andari, I., Abani, A., Ekonomi, F., Bisnis, D., & Timor, U. (2022). Strategi Pengembangan Produksi Garam di Wini-Perbatasan Timor Leste (Salt Production Development Strategy in Wini-Timor Leste Border). *Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 9(1), 7–13.
- Putri, O., & Sugiarti, T. (2021). Perkembangan dan Faktor yang Mempengaruhi Permintaan Volume Impor Garam Industri di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis*, 5(3), 748–761. <https://doi.org/10.21776/ub.jepa.2021.005.03.13>
- Rakhman, R. M. N. D., & Listiana, Y. (2023). PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PETANI GARAM DI DESA PESANGGRAHAN, KECAMATAN KWANYAR, KABUPATEN BANGKALAN. *Buletin Ekonomika Pembangunan*, 4(2). <https://doi.org/10.21107/bep.v4i2.23638>
- Safitri, F. U. M. A. P. (n.d.). *Dampak Perpres No. 126 Tahun 2022 Terhadap Upaya Mencapai Swasembada Garam 2024*.
- Setiani. (n.d.). *Implementasi Kebijakan Pengembangan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) Di Kabupaten Pati Tahun 2020-2022*.
- Sururi, A. (n.d.). *PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KECAMATAN WANASALAM KABUPATEN LEBAK*.